



PILAR-PILAR PENDUKUNG KEBERLANJUTAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Nabilah Putri Andini^{1)*}, Malahayatie¹⁾

nabilahputriandini6138@gmail.com, malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id

^{1) 2)} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Informasi Artikel

Terima 07/08/2024
Revisi 12/08/2024
Disetujui 21/02/2025

Kata Kunci:

Industri Halal, Pilar
Pendukung Industri
Halal, Rantai
Pasokan

A B S T R A K

Industri halal telah berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri ini, diperlukan pilar-pilar pendukung yang mencakup regulasi, sertifikasi, inovasi, serta infrastruktur pendukung. Regulasi yang jelas dan sertifikasi halal yang kredibel menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Inovasi dalam teknologi produksi dan distribusi turut berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk halal. Industri halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menyajikan pilar-pilar yang mendukung industri halal di Indonesia. Pilar-pilar industri halal mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh rantai pasokan dan produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber jurnal terkait. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pilar pendukung industri halal meliputi yang pertama ialah pemerintah yaitu harus membantu penerapan ekosistem halal pada tingkat yang sesuai, dimana pemerintah dapat membantu finansial jaminan halal. Yang kedua ialah infrastruktur yaitu sebagai landasan ekosistem industri halal, infrastruktur merupakan bagian dari sektor logistik bahan baku dan rantai pasokan yang akan mendukung pertumbuhan berbagai industri. Yang ketiga ialah sumberdaya manusia (SDM), yaitu meningkatkan kesadaran akan kebijakan halal dan pentingnya jaminan halal di Indonesia dapat membantu meningkatkan dan memperkuat pilar SDM. Dan yang terakhir adalah pelayanan/service yaitu layanan berupa dukungan terhadap pelaku usaha halal khususnya UMKM juga harus diberikan.

Keyword:

Halal Industry,
Supporting
Pillars of the

A B S T R A C T

The halal industry has grown rapidly in various sectors, including food, cosmetics, pharmaceuticals and tourism. To

*Halal Industry,
Supply Chain*

ensure the sustainability and competitiveness of this industry, supporting pillars are needed which include regulations, certification, innovation and supporting infrastructure. Clear regulations and credible halal certification are the main elements in building consumer trust. Innovation in production and distribution technology plays a role in increasing the efficiency and quality of halal products. The halal industry requires support from various parties. The main objective of this article is to present the pillars that support the halal industry in Indonesia. The pillars of the halal industry cover various interconnected aspects to ensure compliance with sharia principles throughout the supply and production chain. The research method used is literature study by analyzing various related journal sources. The research results show that the supporting pillars of the halal industry include the first, namely the government, which must help implement the halal ecosystem at an appropriate level, where the government can provide financial support for halal guarantees. The second is infrastructure, namely as the foundation of the halal industrial ecosystem, infrastructure is part of the raw material logistics sector and supply chain which will support the growth of various industries. The third is human resources (HR), namely increasing awareness of halal policies and the importance of halal guarantees in Indonesia can help improve and strengthen the HR pillar. And finally, service, namely services in the form of support for halal business actors, especially MSMEs, must also be provided.

PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di tingkat global, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di berbagai negara lain yang melihat potensi pasar halal sebagai peluang ekonomi yang signifikan (Haleem et al., 2021). Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor seperti kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, dan produk-produk gaya hidup lainnya (Ali & Suleman, 2020). Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kehalalan dan kualitas produk, permintaan terhadap produk dan layanan halal pun semakin meningkat (Wilson & Liu, 2019). Secara umum, lembaga-lembaga pemerintah dan korporasi di Indonesia masih belum memiliki peta jalan yang jelas dan kooperatif. Pertumbuhan ekosistem industri halal di Indonesia berasal dari sejumlah organisasi Indonesia, antara lain Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, dan Bapenas. Strategi industri halal Indonesia nampaknya

menyoroti potensi Indonesia yang lebih besar. Selain posisi geopolitik yang menguntungkan, Indonesia berpotensi memimpin industri halal global karena sumber daya manusianya yang unggul, potensi peraturan perundang-undangan (UU No. 34 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019), serta statusnya sebagai negara terdepan dalam industri halal. negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, jumlah konsumen makanan halal di Indonesia mungkin dipandang sebagai pasar potensial, bukan sekadar pasar. Fondasi sektor halal memberikan dasar yang kuat untuk ekspansi dan kelangsungan jangka panjangnya. Hal ini menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa barang dan jasa diproduksi sesuai dengan standar halal Islam. Bisnis halal dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian jika pilar-pilar ini dipahami dengan baik.

Untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan industri halal, diperlukan pilar-pilar pendukung yang kuat. Pilar-pilar ini meliputi regulasi yang jelas, sertifikasi halal yang kredibel, inovasi dalam produksi dan distribusi, serta infrastruktur yang mendukung ekosistem industri halal (Aziz & Chok, 2013). Regulasi dan sertifikasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (Bashir et al., 2018). Sementara itu, inovasi dan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas produk halal yang dihasilkan (Zailani et al., 2015). Selain itu, dukungan infrastruktur seperti laboratorium pengujian halal, sistem logistik, dan kebijakan pemerintah yang proaktif akan semakin memperkuat ekosistem industri halal (Tieman, 2011).

Industri halal mencakup berbagai peluang, bukan hanya makanan. Industri halal mempunyai banyak harapan; Barang-barang halal, yang dulunya penting bagi komunitas Muslim, kini menjadi bagian dari tren perdagangan dan cara hidup dunia. Ini adalah mesin ekspansi ekonomi global yang berbeda. Setiap tahun, bisnis halal mengalami peningkatan permintaan konsumen global. Saat ini, barang dan jasa halal sedang dipertimbangkan dan dihargai di negara-negara dimana terdapat minoritas Muslim. Dengan pangsa pasar yang besar, industri halal masih terus berkembang. Pilar pendukung industri halal mencakup serangkaian faktor yang menopang dan menjamin kelangsungan dan perluasan industri halal. Selain makanan dan minuman, industri halal juga bergerak di bidang farmasi, fashion, jasa keuangan, perjalanan, dan kosmetik. Artikel ini akan membahas berbagai pilar pendukung industri halal yang menjadi faktor kunci dalam pengembangannya. Dengan memahami dan mengoptimalkan pilar-pilar tersebut,

diharapkan industri halal dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global.

KAJIAN LITERATUR

Konsep dan Perkembangan Industri Halal, Industri halal telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kehalalan produk serta pertumbuhan populasi Muslim di dunia (Wilson & Liu, 2019). Konsep halal mencakup berbagai aspek, tidak hanya dalam makanan dan minuman, tetapi juga dalam sektor kosmetik, farmasi, pariwisata, dan layanan keuangan syariah (Ali & Suleman, 2020). Studi yang dilakukan oleh Haleem et al. (2021) menunjukkan bahwa pasar halal memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan permintaan yang terus meningkat di negara-negara Muslim dan non-Muslim.

Regulasi dan Sertifikasi Halal, Salah satu pilar utama dalam industri halal adalah regulasi dan sertifikasi yang jelas. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang (Aziz & Chok, 2013). Menurut Bashir et al. (2018), adanya regulasi yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberikan perlindungan terhadap produk halal dari praktik penipuan. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, telah mengembangkan sistem sertifikasi halal yang ketat untuk memastikan standar kehalalan yang tinggi.

Inovasi dan Teknologi dalam Industri Halal, Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung industri halal, terutama dalam proses produksi dan distribusi. Penelitian yang dilakukan oleh Zailani et al. (2015) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, seperti blockchain dan Internet of Things (IoT), dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasok halal. Selain itu, inovasi dalam bioteknologi dan pengujian halal juga berkontribusi dalam memastikan kehalalan produk, terutama dalam industri makanan dan farmasi (Haleem et al., 2021).

Infrastruktur Pendukung Industri Halal, Keberhasilan industri halal tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang memadai, seperti laboratorium pengujian halal, sistem logistik yang terintegrasi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Tieman (2011) menekankan pentingnya pengembangan ekosistem halal yang komprehensif agar industri ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, peran pemerintah dalam menyediakan regulasi yang mendukung, serta kerja sama dengan sektor swasta, menjadi

faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri halal secara global (Ali & Suleman, 2020).

Tren dan Tantangan dalam Industri Halal, Meskipun industri halal mengalami pertumbuhan yang pesat, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Menurut studi yang dilakukan oleh Wilson & Liu (2019), salah satu tantangan utama adalah harmonisasi standar halal di berbagai negara. Perbedaan standar sertifikasi di berbagai negara dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional produk halal. Selain itu, edukasi dan kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal juga perlu ditingkatkan agar pasar halal dapat berkembang lebih luas (Bashir et al., 2018).

Perkembangan saat ini adalah industri halal, atau industri yang menganut standar Islam. Contoh industri tersebut antara lain pendidikan Islam, keuangan syariah, kosmetik dan obat-obatan halal, pariwisata halal, bisnis makanan halal, dan bahkan fashion syariah. Menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, industri adalah suatu tempat dan suatu usaha yang menghasilkan suatu barang atau jasa dan mempunyai potensi menghasilkan uang bagi pelaksananya. (Jikem dkk, 2023) Tinjauan literatur terkait memberikan dukungan terhadap kerangka teori penelitian ini. Landasan pemahamannya meliputi gagasan seputar industri halal, instrumen investasi syariah, mekanisme pasar modal syariah, dan dasar-dasar keuangan syariah.

Pilar pendukung industri halal adalah sejumlah elemen yang menjamin dan mendorong pertumbuhan dan kelangsungan hidup sektor tersebut. Sektor halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman tetapi juga obat-obatan, fesyen, jasa keuangan, perjalanan, dan kosmetik. Selain sekedar makanan, industri halal mencakup beragam pilihan. Bisnis halal memiliki banyak potensi karena, meskipun dulunya penting bagi komunitas Muslim, produk halal kini menjadi bagian dari budaya populer dan perdagangan internasional. Hal ini merupakan katalisator tersendiri bagi perluasan perekonomian dunia.

Di antara pilar pendukung tersebut terdapat beberapa komponen penting yang membantu pengembangan bisnis halal dan menghormati standar syariah. Infrastruktur, peraturan dan hukum, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi, serta kolaborasi internasional adalah beberapa landasannya, bersama dengan sertifikasi halal. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai pilar dukungan ini diperlukan untuk membangun dan memperluas industri halal yang kuat. Agar industri ini berhasil, kerja sama antara pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat sangat penting karena hal ini

menjamin penerapan standar halal dan memenuhi kebutuhan pelanggan Muslim di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Gagasan tentang ekologi ekonomi syariah dan metodologi studi literatur digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KNEKS, Kementerian Perindustrian, dan sumber lainnya memberikan data sekunder kepada penulis. Langkah-langkah prosedur analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, perumusan kesimpulan, dan verifikasi. Studi ini memvalidasi pendekatan KNEKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) dalam memperkuat sektor halal. Untuk memenuhi permintaan produk halal baik lokal maupun internasional, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi pengembangan dan promosi industri halal nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGUATAN PILAR INDUSTRI HALAL

Dalam penguatan pilar terdapat empat pilar dalam pengembangan Ekosistem Industri halal di Indonesia, yaitu;

Pemerintah

Untuk menjaga suasana syariah dan halal, pemerintah harus membantu penerapan ekosistem halal pada tingkat yang sesuai. Perlu diambil kebijakan makro dan mikro. Pemerintah telah menyelesaikan undang-undang tersebut. Ia menciptakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah dapat membantu aspek finansial jaminan halal. Misalnya, menawarkan bantuan keuangan dan subsidi kepada UMKM agar bisa menyelesaikan sertifikasi.

Infrastruktur

Di setiap daerah juga disiapkan infrastruktur berupa rantai pasok halal dan logistik dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing usaha. Sebagai landasan ekosistem industri halal, infrastruktur merupakan bagian dari sektor logistik bahan baku dan rantai pasokan, yang akan mendukung pertumbuhan berbagai industri terkait di industri makanan, farmasi, perjalanan, kosmetik, dan keuangan.

Sumberdaya Manusia (SDM)

Peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jaminan halal. Hal ini tentunya memprihatinkan karena saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari bahwa makanan mereka halal. Meningkatkan kesadaran akan kebijakan halal dan pentingnya jaminan halal di Indonesia dapat membantu meningkatkan dan memperkuat pilar SDM. Sangat penting untuk meningkatkan kesiapan pelaku bisnis halal dengan menawarkan pelatihan yang cukup untuk kemampuan kerja yang berkaitan erat dengan halal, termasuk auditor dan supervisor. Selain kedua hal tersebut, penguatan kompetensi sumber daya manusia untuk pengujian produk dan bahan, serta seluruh keterampilan primer dan sekunder, juga penting bagi rantai ekosistem industri halal di Indonesia.

Pelayanan/Service

Perhatian terakhir adalah jasa, yang mencakup pendanaan dan jasa keuangan. Masalah utama keuangan syariah adalah distribusi; pada akhirnya, mengingat proses hukum pengalokasian dana sesuai syariah sangatlah penting. Selain itu, layanan berupa dukungan terhadap pelaku usaha halal khususnya UMKM juga harus diberikan.

Makanan dan minuman masih menjadi bagian dari industri prioritas halal di Indonesia. Pengelolaan industri lain di masa depan, yang jelas sangat menjanjikan, termasuk pariwisata, kosmetik, dan obat-obatan, dapat berkontribusi pada bisnis halal global dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

PILAR PENDUKUNG UTAMA DALAM INDUSTRI HALAL

Sejumlah elemen krusial yang menjamin barang dan jasa mematuhi kaidah syariah Islam menjadi pilar pendukung utama sektor halal. Selain itu, pilar utama dukungan industri halal adalah sebagai berikut: 1) Standar dan undang-undang Halal: Untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan halal, sangat penting untuk menerapkan standar dan undang-undang yang jelas dan diakui secara global. Hal ini mencakup sertifikasi halal dari badan terakreditasi. 2) Lembaga Sertifikasi Halal: Tugasnya meliputi melakukan audit dan mensertifikasi makanan halal. Mereka menjamin bahwa barang akhir, bahan mentah, dan prosedur produksi semuanya mematuhi standar halal yang berlaku. 3) Pendidikan dan Pelatihan: Penting untuk memberikan pendidikan mengenai nilai produk halal serta cara membuat dan menanganinya sesuai dengan standar halal. Pelatihan bagi produsen, pelaku industri, dan konsumen merupakan bagian dari hal ini. 4) Infrastruktur dan Teknologi: Penting untuk

memiliki fasilitas yang memadai untuk rantai pasokan dan logistik halal, serta laboratorium dan teknologi pengujian halal untuk memungkinkan produksi halal. 5) Penelitian dan Pengembangan (Litbang): Litbang penting untuk menciptakan produk halal baru, meningkatkan kualitas produk halal yang sudah ada, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bisnis halal. 6) Kerja Sama Internasional: Dengan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar atau yang telah mengembangkan sektor halal, kita dapat menerapkan praktik terbaik dan membuka pasar baru. 7) Kesadaran Konsumen: Meningkatkan pengetahuan konsumen tentang nilai produk halal dan menyebarkan informasi yang akurat dan tidak memihak akan meningkatkan pasar barang halal. 8) Dukungan pemerintah: Penting bagi pemerintah untuk memberikan peraturan yang mendorong ekspansi industri halal, serta keringanan pajak, membantu pemasaran luar negeri, dan mendukung pameran dan acara industri halal. 9) Keuangan Islam: Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, industri keuangan Islam memfasilitasi investasi dan pembiayaan dalam bisnis halal. Pilar-pilar ini akan membantu bisnis halal berkembang dan berkembang secara berkelanjutan, memenuhi permintaan pelanggan Muslim secara global, dan menjadi lebih kompetitif di panggung dunia.

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PRODUK HALAL

Besarnya pasar barang halal baik di dalam negeri maupun internasional mempunyai potensi yang sangat besar yang dapat mendukung pertumbuhan sektor produk halal di tanah air. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia menjadi faktor pendorong bisnis produk halal. Bisnis produk halal akan sangat terdorong oleh besarnya potensi pasar dalam negeri. Selain itu juga diperkuat dengan kerukunan umat beragama dan pola hidup moderat.

Hal ini menguntungkan karena memperlancar arus perdagangan komoditas Indonesia. Merupakan tugas konstitusional negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk menjalankan agama sesuai keinginan mereka. Terkait dengan jaminan tersebut, umat Islam Indonesia memandang ketersediaan makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologi, dan barang rekayasa genetika yang dijamin halal sesuai syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah; Oleh karena itu, konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tersebut harus dilindungi undang-undang.

Salah satu tanda semakin besarnya kesadaran masyarakat terhadap agama adalah semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kehalalan barang yang dikonsumsi. Peningkatan kesadaran harus sejalan dengan inisiatif untuk meningkatkan perlindungan pemerintah dan program pendidikan mengenai jaminan produk halal.

Bagi siapa pun yang bertindak baik sebagai subjek maupun konsumen, hak-hak ini tidak dapat dicabut. Pelanggan perlu diperlakukan sebagai subjek. Kepentingan dan keselamatan harus dilindungi secara hukum sebagai subjek hukum, dan pemerintah harus mengawasi proses perlindungan tersebut. Merupakan tanggung jawab moral produsen, distributor, dan penjual untuk melindungi pelanggan. Produsen, distributor, dan penjual harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada konsumen. Kewajiban ini melampaui kewajiban hukum dan mencakup pertimbangan etika dan sosial.

Hak-hak dasar yang dilindungi UUD 1945 salah satunya adalah jaminan produk halal bagi masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, salah satu instrumen yang mengendalikan hal ini adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang ditetapkan pada tahun 2014. Fakta bahwa negara kita memiliki undang-undang yang mengatur penerapan jaminan produk halal akan bermanfaat bagi pertumbuhan industri produk halal dalam negeri. Irman Putra Sidin (2014) menyoroti bahwa mengamankan sertifikasi produk halal bagi komunitas Muslim merupakan perkembangan positif bagi sektor produk halal dalam hal ini. Salah satu instrumen yang membantu masyarakat Muslim menerapkan jaminan pangan halal adalah Undang-Undang Jaminan Pangan Halal. Untuk menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat, pemerintah meyakini Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan jaminan pasokan produk halal. Masyarakat akan terlindungi dari produk-produk yang menimbulkan risiko kesehatan dengan tersedianya barang halal.

Jika dibandingkan dengan seluruh produk yang beredar di Indonesia, persentase produk yang memiliki sertifikat halal masih cukup rendah menurut data yang ada saat ini. Akibatnya, masih banyak lagi barang-barang yang beredar di masyarakat yang belum terjamin kehalalannya dibandingkan yang sudah ada. Mengembangkan rencana yang baik adalah langkah pertama untuk memitigasi kelemahan bisnis produk halal lokal. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mengatasi kekurangan spesialis produk halal, ketidaktahuan umum tentang produk halal, dan infrastruktur serta gadget teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Misalnya, pemerintah dan seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dapat memperluas aksi gerakan masyarakat sadar halal dalam melakukan

sosialisasi dan edukasi tentang produk halal. Disarankan untuk mengutamakan pembahasan materi produk halal dalam khutbah Jumat, majelis taklim, dan acara keagamaan lainnya. Selain itu, kurikulum pelajaran agama di sekolah negeri juga boleh memuat pembahasan produk halal.

Agar pengusaha dapat memanfaatkan pasar makanan halal, perlu ada upaya lebih besar yang dilakukan oleh instansi dan lembaga terkait untuk menyebarkan pengetahuan dan pendidikan tentang sertifikasi halal dengan mengunjungi lokasi usaha atau asosiasi pengusaha secara langsung. Hal ini akan mengatasi masalah terbatasnya waktu para pengusaha dalam mengumpulkan informasi dan tentunya akan berdampak signifikan terhadap pandangan mereka terhadap penyelesaian sertifikasi halal. Dalam hal ini, pemilik usaha perlu diinformasikan bahwa penambahan label halal akan meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang yang diproduksinya. Mayoritas konsumen menganggap barang halal lebih aman dan kualitasnya lebih baik dibandingkan produk non-halal.

Bisnis yang menyediakan produk halal mungkin menghadapi kesulitan bersaing dalam penerapan pasar bebas regional dan global. Namun tentu saja, Anda harus siap memanfaatkan segala kemungkinan yang ada. Dalam persaingan pasar bebas, pelaku usaha yang unggul dalam kualitas dan ikatan dagang akan menjadi pemenang. Persaingan sempurna-yang mengutamakan kualitas-akan muncul dari sini. Agroindustri halal berpotensi menjadi mesin perekonomian Indonesia di masa depan jika kemajuan pengembangan produk halal terus dilakukan sesuai standar internasional. Sehubungan dengan itu, civitas akademika harus berupaya memajukan ilmu pengetahuan berbasis ilmu halal. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan Halal Center yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan industri produk halal.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produk halal sangat penting untuk proses produksi yang cepat dan efektif yang menggunakan teknologi kontemporer serta instrumen, proses, dan kombinasi tertentu untuk menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Dalam hal ini, tentunya tidak lagi sulit untuk menentukan kehalalan suatu produk secara manual dan sederhana. Oleh karena itu, prosedur pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, termasuk persyaratan laboratorium sebagai metodenya, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi produk halal.

Perluasan pasar produk halal akan memacu pertumbuhan dan kemajuan industri lain yang memasok produk halal, khususnya di bidang teknologi. Terbentuknya Masyarakat

Ekonomi ASEAN dan perdagangan bebas dapat dilihat dari dua sudut pandang oleh individu yang memanfaatkan produk halal: sebagai kemungkinan dan sebagai ancaman. Namun secara umum, para pengusaha produk halal Indonesia lebih memandang hal ini sebagai sebuah bahaya. Demikian pula, para peserta studi yang merupakan pengusaha makanan merasa lebih tidak siap menghadapi pasar terbuka. Karena barang-barang yang lebih murah datang dari negara-negara pesaing-khususnya Malaysia, Singapura, dan Thailand-mereka memandang pasar bebas lebih sebagai ancaman daripada peluang.

Menurut GAPMMI, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, negara belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pertarungan ini akan sengit karena sektor makanan dan minuman di Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia. Risiko lain terhadap kelangsungan bisnis adalah tidak adanya jembatan bisnis yang memungkinkan pemilik usaha kecil bersaing di pasar global dalam pasar bebas. UMKM yang menjual makanan halal. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan negara lain guna memfasilitasi distribusi produk dalam negeri di pasar bebas. Pemetaan yang telah dibahas sebelumnya memungkinkan untuk dirumuskan beberapa strategi pengembangan industri barang halal Indonesia sebagai berikut: 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan produk halal. Karena saat ini nara sumber dan penyuluh belum mencukupi untuk menyamai jumlah komunitas muslim di Indonesia, maka gerakan komunitas halal di Indonesia belum menjangkau seluruh lapisan dan lapisan masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh sangat terbatasnya jumlah sumber daya manusia di industri produk halal. 2) Meningkatkan jumlah pertukaran informasi, kampanye pendidikan, dan komunikasi tentang produk halal dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan halal. 3) Pendirian Halal Center sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk halal dapat menjadi salah satu program yang mendukung tujuan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan produk halal. 4) Menyelenggarakan pendistribusian dan pembuatan barang halal. Satu suara dapat mempengaruhi pelaku usaha di bidang produk halal jika terdapat koordinasi satu pihak dari perusahaan produk halal dalam negeri, karena hal ini dapat memastikan kebijakan lembaga tidak tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain. 5) Memperluas peran komunitas halal. Untuk menarik produsen dan pelanggan serta menumbuhkan industri produk halal, pemerintah perlu memainkan peran yang lebih kuat dalam komunitas halal yang tercipta dengan cepat. 6) Membangun jaringan perdagangan global barang halal. Pemerintah harus ikut membangun jaringan bisnis bagi perusahaan

produk halal, khususnya UMKM, guna melawan ketatnya persaingan yang ada di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kolaborasi internasional di bidang industri produk halal.

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Industri halal mengacu pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Istilah halal dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum agama Islam. Sebaliknya, yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh hukum Islam.

Industri halal mencakup berbagai bidang, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, perbankan, pariwisata dan lainnya. Produk atau layanan yang dikategorikan sebagai halal harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas agama Islam atau badan-badan sertifikasi halal yang sah (Majelis Ulama Indonesia/MUI, Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH, Majelis Ulama Indonesia/LPPOM MUI, dan Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika). Sektor halal memiliki sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi, seperti:

Bahan baku: Daging hewan yang disembelih sesuai dengan praktik halal merupakan salah satu contoh bahan yang harus berasal dari sumber halal agar dapat dimanfaatkan dalam produksi. **Cara produksi:** Caranya harus berpegang pada prinsip halal dan tidak menggabungkan bahan-bahan yang dilarang atau melalui prosedur yang bertentangan dengan hukum halal. **Pemrosesan dan pemrosesan:** Setiap langkah proses, termasuk pembersihan dan disinfeksi peralatan produksi, harus mematuhi peraturan halal. **Label dan sertifikasi:** Produk yang dianggap halal harus mendapat sertifikasi dari organisasi yang dihormati dalam komunitas Muslim. Pelanggan dapat mengidentifikasi produk yang mematuhi prinsip halal dengan mencari label halal.

Selain memainkan peran ekonomi yang signifikan di masyarakat, bisnis halal juga berkembang di pasar dunia dimana permintaan barang dan jasa halal meningkat. Karena meningkatnya jumlah umat Islam dan kesadaran mereka terhadap standar halal, bisnis ini berkembang dan memiliki potensi signifikan untuk mendukung perdagangan internasional dan kemajuan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis halal di Indonesia berkembang pesat. Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menumbuhkan dan memajukan sektor halal. Industri ini mencakup

sejumlah bidang ekonomi, termasuk keuangan, makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, dan pariwisata. Sektor makanan dan minuman halal: Sektor ini mungkin yang paling terkenal dalam industri halal di Indonesia. Otoritas sertifikasi yang diakui mengidentifikasi banyak produk bisnis makanan dan minuman Indonesia sebagai produk halal karena memenuhi persyaratan halal. Masakan khas Indonesia antara lain nasi goreng, sate, rendang, coto Makassar, dan jajanan tradisional memegang peranan penting dalam bisnis ini.

Perjalanan halal: Indonesia memiliki banyak kemungkinan untuk menawarkan wisatawan halal. Sejumlah tempat wisata seperti tempat makan, pilihan penginapan, dan tempat rekreasi yang ramah umat Islam telah menciptakan fasilitas dan layanan yang memenuhi standar halal.

Pembiayaan halal: Bank dan organisasi keuangan lainnya yang menyediakan jasa dan barang keuangan yang mematuhi standar halal, seperti produk perbankan syariah, merupakan bagian dari perluasan sektor keuangan halal di Indonesia. Industri halal Indonesia berkembang melalui beberapa cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi industri ini, seperti; Menetapkan standar dan peraturan halal yang kredibel: Pemerintah dan otoritas terkait harus menciptakan standar dan peraturan halal yang lengkap, tidak ambigu, dan selaras dengan ajaran Islam. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjamin keseragaman dan kejelasan dalam prosedur sertifikasi halal.

Meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal: Mendapatkan kepercayaan konsumen memerlukan konsentrasi pada peningkatan kualitas dan keamanan produk halal. Berinvestasi dalam teknologi produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta penelitian dan pengembangan semuanya dapat menghasilkan perbaikan di bidang ini.

Pembangunan infrastruktur dan teknologi: Untuk meningkatkan ekspansi industri halal, teknologi kontemporer dan infrastruktur yang terpelihara dengan baik sangatlah penting. Peningkatan efisiensi dan daya saing industri dapat dicapai melalui investasi pada rantai pasokan, teknologi informasi, dan fasilitas produksi.

Pemberdayaan UKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) juga menguasai industri halal selain perusahaan besar. Jumlah produk halal di pasar dapat meningkat jika UKM diberikan perangkat yang mereka perlukan untuk memahami dan mematuhi peraturan halal.

Pendidikan dan pelatihan: Untuk membentuk tenaga kerja yang mampu mengelola dan mengembangkan bisnis halal, pendidikan dan pelatihan di bidang jaminan halal, pengolahan makanan, manajemen, dan bidang terkait lainnya sangatlah penting.

Pemasaran dan promosi: Teknik pemasaran yang cerdas dapat meningkatkan pengetahuan pelanggan tentang barang halal Indonesia. Pameran, inisiatif pemasaran internet, dan kemitraan media adalah beberapa metode promosi ini.

Pengembangan pariwisata halal: Dengan menciptakan akomodasi dan layanan yang mematuhi norma halal, Indonesia berpotensi menjadi tujuan wisatawan halal. Hal ini mencakup penginapan, tempat makan, dan layanan lainnya yang mungkin menarik wisatawan Muslim.

Kerjasama dengan negara lain: Mempromosikan sektor halal secara internasional dapat membantu menumbuhkan pasar ekspor dan meningkatkan kesadaran akan barang-barang Indonesia di seluruh dunia.

Inovasi Produk: Sektor halal dapat mendukung kreativitas dalam penciptaan barang-barang baru yang memenuhi standar halal. Ini mencakup bahan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan layanan lainnya yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dan penguatan sistem sertifikasi, dimana memastikan transparansi dan integritas dalam proses sertifikasi halal melalui penguatan sistem pengawasan dan audit.

Mengutip sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada Konferensi Keuangan Islam Tahunan 2023 (AIFC ke-7), sebuah pertemuan tahunan perdana dengan tema mengkaji cara-cara meningkatkan ekonomi halal sebagai pendorong pertumbuhan di Indonesia pada Selasa, 29-30 Agustus 2023. Meskipun ada beberapa hambatan internasional, pasar halal berkembang dengan baik. Secara global, 1,9 miliar umat Islam akan membeli barang-barang halal pada tahun 2021, menghabiskan dana sebesar US\$2 triliun. Pada tahun 2030, pengeluaran ini diperkirakan akan meningkat menjadi US\$4,96 triliun, tingkat pertumbuhan yang tinggi yaitu lebih dari 9%.

Mengingat Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia lebih dari 229,62 juta jiwa, atau sekitar 87,2% dari total populasi negara ini yang berjumlah 269,6 juta jiwa pertumbuhan ekonomi halal sangatlah penting. Indonesia merupakan pasar barang dan jasa halal. Dalam hal produk halal, Indonesia adalah raksasa pasar. Hal ini berarti bahwa melalui penciptaan dan perluasan ekonomi halal, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang adil dan berjangka panjang. Melalui peluang ekspor dan investasi, ekonomi halal berpotensi mendongkrak produk

domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar US\$5,1 miliar (atau sekitar Rp 72,9 triliun) setiap tahunnya.

Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya tersedia tiga alternatif: pilar investasi, perdagangan, dan konsumsi.

1). Pilar Konsumsi: Mempromosikan standar sertifikasi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, menjamin dan memasukkan pendanaan halal ke dalam ekosistem produk halal. Sebagai gambaran, pendidikan konsumen dan kampanye kesadaran meningkatkan pengetahuan konsumen tentang pentingnya produk halal, serta manfaatnya bagi nilai-nilai agama dan kesehatan. Upaya edukasi masyarakat mengenai produk halal dan cara membedakannya dapat difasilitasi melalui seminar, kampanye media sosial, dan acara publik. mempromosikan inovasi produk halal, yaitu mendorong dunia usaha untuk menciptakan barang-barang halal mutakhir yang memenuhi selera pelanggan masa kini. Hal ini dapat mencakup penciptaan produk kecantikan halal yang mutakhir, masakan khusus halal yang dimodernisasi, dan produk lainnya. Sertifikasi halal yang mudah diakses, memudahkan pelaku usaha, khususnya UKM, untuk menjalani proses sertifikasi halal. Akses UKM ke pasar halal dapat difasilitasi dengan memberikan panduan dan menyederhanakan proses sertifikasi.

2). Pilar Perdagangan: melibatkan potensi perdagangan produk halal di negara-negara Muslim dan non-Muslim melalui perdagangan, promosi, dan peningkatan kesadaran global terhadap produk halal. Meningkatkan ekspor produk halal berarti meningkatkan kualitas, kemasan yang menarik, dan kampanye pemasaran yang sukses. Hal ini juga mempromosikan ekspor produk halal ke pasar luar negeri dengan mematuhi standar internasional dan memanfaatkan perjanjian perdagangan saat ini. Selain itu, membentuk aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki industri halal yang kuat atau pasar yang belum dimanfaatkan dalam jumlah besar dapat meningkatkan akses pasar yang saling menguntungkan melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Aktifkan perdagangan halal, karena hal ini pada akhirnya akan mengarah pada pembangunan infrastruktur perdagangan halal, seperti fasilitas pengujian dan sertifikasi lanjutan. Pemerintah kemudian dapat menawarkan insentif kepada bisnis yang terlibat dalam perdagangan halal. mempromosikan kemampuan ekspor produk halal yang lebih besar.

3). Pilar Investasi: Mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mempromosikan produk halal dan menyederhanakan prosedur perizinan berusaha untuk menguntungkan sektor swasta. Salah satu cara untuk mendorong investasi teknologi dan penelitian halal adalah dengan mengundang dana untuk penelitian dan pengembangan

guna menciptakan teknologi baru yang akan memfasilitasi sertifikasi dan produksi halal. Efektivitas dan kualitas produk halal dapat memperoleh manfaat dari investasi ini. Menawarkan insentif untuk investasi, seperti potongan pajak, dukungan infrastruktur, dan akses terhadap fasilitas produksi canggih, kepada investor yang membantu berkembangnya industri halal. Membangun kawasan industri khusus dengan penekanan pada manufaktur dan distribusi barang halal merupakan proses pembentukan kawasan industri halal. Hasilnya, terciptalah ekosistem dalam industri halal yang membantu UKM tumbuh secara berkelanjutan. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis halal global, rencana ini diharapkan dapat bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan sektor halal di Indonesia melalui pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Pengembangan industri halal dalam hal kemandirian, efisiensi, dan keinginan.

Selain itu, pilar-pilar bisnis halal memberikan dasar yang kuat untuk ekspansi dan kelangsungan jangka panjangnya. Bisnis halal dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian jika pilar-pilar ini dipahami dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan ekosistem industri halal di Indonesia memerlukan perhatian dan kolaborasi dari berbagai sektor, yang meliputi pemerintah, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pelayanan. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan menyediakan dukungan finansial untuk UMKM agar mereka dapat memenuhi sertifikasi halal. Infrastruktur yang memadai juga sangat penting untuk mendukung rantai pasokan halal, sementara peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan akan memperkuat pemahaman tentang pentingnya jaminan halal. Di sisi lain, pelayanan berupa dukungan keuangan dan jasa untuk pelaku usaha halal, terutama UMKM, akan mempercepat implementasi ekosistem halal. Dengan fokus pada sektor-sektor seperti makanan, minuman, pariwisata, kosmetik, dan obat-obatan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang dapat berkontribusi pada pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Industri halal membutuhkan berbagai pilar pendukung yang saling terkait untuk memastikan produk dan layanan memenuhi kaidah syariah Islam. Pilar-pilar utama tersebut meliputi penerapan standar dan peraturan halal yang jelas, lembaga sertifikasi

yang kredibel, serta pendidikan dan pelatihan untuk produsen dan konsumen. Infrastruktur yang memadai, dukungan teknologi, serta penelitian dan pengembangan juga sangat penting untuk inovasi dan perbaikan produk halal. Selain itu, kerja sama internasional, kesadaran konsumen, dukungan pemerintah, dan sistem keuangan Islam turut memperkuat ekspansi dan keberlanjutan sektor ini. Semua elemen ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa industri halal dapat berkembang secara global, memenuhi permintaan pasar, dan tetap kompetitif.

Industri produk halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional, berkat populasi mayoritas Muslim dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak konsumen melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta mendukung penyebaran informasi dan pendidikan tentang produk halal kepada masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dalam industri ini, dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai, serta perluasan jaringan perdagangan global bagi produk halal Indonesia. Selain itu, pendirian Halal Center sebagai pusat penelitian dan pengembangan serta penguatan peran komunitas halal dapat mempercepat pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, mengingat populasi Muslim terbesar di dunia dan permintaan global terhadap produk halal yang terus meningkat. Indonesia dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama: konsumsi, perdagangan, dan investasi. Untuk mendukung pertumbuhan industri halal, penting untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk, memperkuat infrastruktur, mempermudah proses sertifikasi halal, serta memperkenalkan inovasi produk halal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Selain itu, kerjasama internasional dan promosi produk halal Indonesia dapat membuka peluang ekspor dan memperluas pasar global. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan industri halal di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan peningkatan badan sertifikasi halal yang diakui secara global, fasilitas produksi yang memenuhi standar halal untuk kawasan industri halal, kampanye pemasaran yang menekankan nilai dan keunggulan produk halal, dan kemitraan dengan negara-negara penghasil produk semuanya diperlukan untuk memperkuat fondasi industri halal. mendorong industri halal untuk bertukar informasi dan teknologi, merencanakan sesi pelatihan produsen mengenai

prosedur manufaktur halal dan standar yang diperlukan, dan, yang terakhir, meningkatkan dana penelitian untuk inovasi produk halal dan teknik pengujian baru yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H., & Suleman, N. (2020). Halal supply chain: Current trends and future directions. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961-981.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 4(6), 1-10.
- Bashir, A. M., Bayat, A., & Rafique, Y. (2018). The impact of halal certification on consumer behavior in the global market. *Journal of Business Ethics*, 20(5), 200-210.
- Haleem, A., Khan, M. I., Khan, S., & Jami, A. R. (2021). Research status in halal: A review and bibliometric analysis. *Food Research International*, 139, 109107.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186-195.
- Wilson, J. A., & Liu, J. (2019). Halal branding: The interplay of religion, culture, and ethics. *Journal of Business Research*, 97, 108-120.
- Zailani, S., Kanapathy, K., & Iranmanesh, M. (2015). Drivers of halal orientation strategy among halal food firms. *British Food Journal*, 117(8), 2143-2160.
- Ali, M. H., & Suleman, N. (2020). Halal supply chain: Current trends and future directions. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961-981.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 4(6), 1-10.
- Bashir, A. M., Bayat, A., & Rafique, Y. (2018). The impact of halal certification on consumer behavior in the global market. *Journal of Business Ethics*, 20(5), 200-210.
- Haleem, A., Khan, M. I., Khan, S., & Jami, A. R. (2021). Research status in halal: A review and bibliometric analysis. *Food Research International*, 139, 109107.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186-195.
- Wilson, J. A., & Liu, J. (2019). Halal branding: The interplay of religion, culture, and ethics. *Journal of Business Research*, 97, 108-120.
- Zailani, S., Kanapathy, K., & Iranmanesh, M. (2015). Drivers of halal orientation strategy among halal food firms. *British Food Journal*, 117(8), 2143-2160.
- Alika, R. 2019. PKL Hingga Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 17 Oktober. Diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/pkl-hingga-rumah-potong-hewan-wajib-sertifikasi-halal-mulai-17-oktober> [28 September 2019]
- Halal MUI. Diakses melalui http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/ceklogin_halal/produk_halal_masuk/1 [12 September 2019]
- Hassan, F., I. Osman, E. S. Kassim, B. Haris. 2019. *Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industri*. Springer
- Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024. Diakses melalui <https://ubico.id/> [1 Oktober 2019]
- Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. *The Future of the Global Muslim Population Projections for 2010-2030*, January 27, 2011. Diakses melalui <http://assets.pewresearch.org/> [12 September 2019]
- Riaz, M. N. dan M. Mm Chaudry. 2018. *Handbook of Halal Food Production*. CRC Press.
- Sholeh, A. N. 2015. Jaminan halal pada produk obat: kajian fatwa MUI dan penerapannya dalam UU Jaminan produk halal. *Jurnal Syariah*. 1(1): 70-88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Yulia, Lady. 2019. "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bisnis Islam* 8 (1): 121-62.
- Zailani, S., R. Othman, N. A. Wahid, Y. Fernando. 2010. Halal Traceability and Halal Tracking Systems in Strengthening Halal Food Supply Chain for Food Industry in Malaysia (A Review). *Journal of Food Technology*. 8(3): 74-